

Keterlibatan Perempuan dan Kebijakan Daerah dalam Pembangunan Responsif Gender di Kabupaten Berau

Winda Jubaidah

Universitas Padjadjaran

winda.jubaidah9@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the issue of gender equality and the role of women in development in Berau Regency, East Kalimantan, with a qualitative descriptive approach based on secondary data. The study found that while women's involvement in development is increasing – including the presence of women leaders in local government – there are a number of gender issues, such as lower female labour force participation, limited representation in strategic positions, and cultural norms that hinder equality. The Berau Regency Government has implemented various gender-responsive policies, including gender mainstreaming (PUG) in regional planning through RPJMD and local regulations (Perda and Perbup), as well as innovative programs such as Women-Friendly Villages and Child Care. Through the analysis of the literature and BPS data, this study recommends strengthening the implementation of PUG, increasing women's participation in the public and economic sectors, and disaggregated data-based monitoring and evaluation frameworks.

Keywords: Gender, Regional Development, Equality, Gender Mainstreaming, Berau

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis isu kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis data sekunder. Kajian ini menemukan bahwa meskipun keterlibatan perempuan dalam pembangunan semakin meningkat – termasuk hadirnya pemimpin perempuan di pemerintahan daerah – terdapat sejumlah isu gender, seperti partisipasi angkatan kerja perempuan yang lebih rendah, representasi yang terbatas dalam posisi strategis, serta norma budaya yang dapat menghambat kesetaraan. Pemerintah Kabupaten Berau telah menerapkan berbagai kebijakan responsif gender, antara lain *pengarusutamaan gender* (PUG) dalam perencanaan daerah melalui RPJMD dan regulasi lokal (Perda dan Perbup), serta program inovatif seperti Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Melalui analisis literatur dan data BPS, studi ini merekomendasikan penguatan implementasi PUG, peningkatan partisipasi perempuan di sektor publik dan ekonomi, serta kerangka monitoring dan evaluasi berbasis data terpilah.

Kata kunci: Gender, Pembangunan Daerah, Kesetaraan, Pengarusutamaan Gender, Berau

PENDAHULUAN

Pembangunan yang berkelanjutan menuntut partisipasi dan manfaat yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, konsep kesetaraan gender menjadi salah satu indikator penting kemajuan sosial dan kualitas pembangunan (nomorsatukaltim.disway.id). Secara global, kesenjangan gender masih nyata. Laporan *Global Gender Gap Index* (GGGI) tahun 2022 menempatkan Indonesia pada skor 0,697 (peringkat 92 dari 146 negara)

(countryeconomy.com), yang mengindikasikan masih adanya gap signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi seperti partisipasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan peluang politik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menjembatani kesenjangan gender perlu terus ditingkatkan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pada level nasional, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap pengarusutamaan gender sejak

diterbitkannya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (peraturan.bpk.go.id). Kebijakan ini mewajibkan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan. Selanjutnya, komitmen tersebut diperkuat dalam berbagai regulasi dan rencana strategis, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menjadikan pengarusutamaan gender sebagai isu lintas sektor (*cross-cutting issue*) untuk mencapai pembangunan inklusif (Bappenas, 2020). Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah dituntut menyusun kerangka pembangunan yang responsif gender, sebagaimana diamanatkan melalui panduan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang berupaya mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan daerahnya. Berau memiliki luas wilayah 34.127 km² dengan jumlah penduduk hampir 300 ribu jiwa pada tahun 2024 (id.wikipedia.org). Secara

demografis, komposisi penduduk Berau relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini berpotensi menjadi modal sosial dalam pembangunan, asalkan peran dan kontribusi perempuan dapat dioptimalkan secara setara. Pemerintah Kabupaten Berau telah mencanangkan slogan pembangunan “SANGGAM” (sehat, anggun, bergairah, aman, dan manusiawi) (id.wikipedia.org) yang mencerminkan visi pembangunan berwawasan kesejahteraan dan kemanusiaan. Kata “anggun” di dalam slogan tersebut dapat dimaknai sebagai simbol kualitas hidup masyarakat yang inklusif gender, di mana perempuan berdaya dan berkontribusi aktif dalam masyarakat.

Meskipun demikian, realita di lapangan menunjukkan masih adanya *isu-isu gender* di Berau yang perlu mendapat perhatian. Isu gender didefinisikan sebagai kondisi ketimpangan atau kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan (peraturan.bpk.go.id). Isu tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk, misalnya kesenjangan dalam tingkat pendidikan, keterlibatan di pasar kerja, tingkat pendapatan, keterwakilan dalam jabatan publik, hingga kerentanan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Berbagai studi menunjukkan bahwa ketimpangan gender tidak hanya

melanggar prinsip keadilan sosial, tetapi juga menghambat laju pembangunan. Kesenjangan gender dapat menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengurangi output ekonomi, karena separuh penduduk (kaum perempuan) tidak terlibat optimal dalam aktivitas produktif. Sebaliknya, pembangunan yang responsif gender diyakini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, karena kebutuhan seluruh masyarakat terpenuhi dengan lebih tepat (nomorsatukaltim.disway.id).

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Berau mengalami perkembangan penting terkait keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Salah satu tonggak sejarah terjadi pada tahun 2021 ketika Sri Juniarsih Mas dilantik sebagai bupati, menjadikannya *Bupati perempuan pertama* di Kabupaten Berau (id.wikipedia.org). Selain itu, DPRD Berau pernah dipimpin oleh seorang perempuan, Syarifatul Sya'diah, pada periode 2014(id.wikipedia.org). Fenomena ini menandakan kemajuan dalam representasi perempuan pada level kepemimpinan lokal, yang dapat menjadi teladan dan motor penggerak bagi agenda pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di daerah. Di sisi lain, kehadiran pemimpin perempuan juga diharapkan mendorong lahirnya

kebijakan-kebijakan daerah yang lebih sensitif gender.

Artikel ini mengulas secara menyeluruh tentang kondisi gender dan pembangunan di Berau dengan fokus pada: (1) isu-isu gender yang dihadapi Kota (Kabupaten) Berau; (2) tingkat keterlibatan dan pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan; (3) kebijakan dan inisiatif daerah terkait kesetaraan gender; serta (4) tantangan dan peluang dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender.

KAJIAN PUSTAKA

Secara konseptual, *kesetaraan gender* merujuk pada keadaan di mana laki-laki dan perempuan menikmati status, hak, dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Pembangunan responsif gender adalah pendekatan pembangunan yang secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi ketimpangan gender, memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh laki-laki maupun perempuan. Menurut teori *Gender and Development (GAD)*, integrasi perspektif gender ke dalam arus utama pembangunan diperlukan agar pembangunan tidak memperdalam ketidakadilan yang sudah ada, melainkan mempersempit kesenjangan dan

memberdayakan kelompok yang terpinggirkan (Moser, 1993).

Instrumen kebijakan untuk mewujudkan pembangunan responsif gender dikenal dengan istilah Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan gender, yakni dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi atas kebijakan dan program (dppkbp3a.beraukab.go.id).

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi strategi ini secara resmi melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000. Inpres tersebut mengamanatkan setiap instansi pemerintah untuk memasukkan pertimbangan gender dalam penyusunan kebijakan dan program. Tindak lanjutnya di level teknis, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan pedoman bagi pemerintah daerah agar melaksanakan PUG, antara lain melalui Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah (Pemkab Berau, 2019).

Selain kerangka kebijakan, pengukuran kesetaraan dan pemberdayaan gender dalam pembangunan kerap menggunakan beberapa indikator komposit. Indeks Pembangunan

Gender (IPG) atau *Gender Development Index* merupakan rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki, yang mencerminkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia berdasarkan gender. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measure* mengukur keterlibatan aktif perempuan dalam aktivitas ekonomi dan politik, misalnya proporsi kursi perempuan di parlemen, partisipasi perempuan dalam tenaga profesional, serta kontribusi pendapatan perempuan terhadap pendapatan nasional. Berdasarkan data BPS, IPM perempuan di Indonesia umumnya sedikit lebih rendah daripada IPM laki-laki, utamanya disebabkan oleh gap pada komponen pendapatan (ekonomi) (peraturan.bpk.go.id).

Di Kabupaten Berau sendiri, literatur spesifik masih terbatas, namun dapat ditarik pembelajaran dari konteks daerah serupa. Kaltim sebagai provinsi telah memiliki Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) yang aktif mengumpulkan data terpilah dan mendorong program ramah perempuan dan anak. Konsep Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) yang diinisiasi Kementerian PPPA menjadi salah satu program andalan yang mulai diimplementasikan di berbagai kabupaten/kota, termasuk Berau (nomorsatukaltim.disway.id). Program KRPPA

bertujuan menciptakan model komunitas tingkat kampung/kelurahan yang memenuhi indikator inklusi gender dan peduli hak anak, misalnya dengan memastikan keterwakilan perempuan dalam musyawarah perencanaan, penyediaan fasilitas umum yang ramah perempuan (pojok laktasi, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan lansia), serta adanya sistem perlindungan bagi perempuan dan anak dari kekerasan (nomorsatukaltim.disway.id)

Kerangka regulasi di Berau juga mengalami penguatan. Awalnya, komitmen ini tertuang dalam Peraturan Bupati Berau No. 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Pmkab Berau, 2019). Regulasi tersebut memberikan panduan teknis bagi OPD dalam menerapkan PUG. Lebih baru lagi, pemerintah daerah dan DPRD Berau mengesahkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Pmkab Berau, 2024). Penerbitan Perda ini menunjukkan peningkatan komitmen dengan kekuatan hukum yang lebih tinggi, sehingga diharapkan implementasi kesetaraan gender dapat terinstitusionalisasi dalam program dan kegiatan pembangunan di Berau. Perda ini mendefinisikan berbagai istilah kunci seperti *isu gender*, *kesetaraan gender*, serta menetapkan kewajiban setiap OPD untuk

menyusun rencana aksi PUG (peraturan.bpk.go.id). Dengan kerangka hukum dan kelembagaan yang semakin jelas, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana realisasi di lapangan dan apa saja hambatan yang ditemui.

Berdasarkan landasan teori dan kebijakan di atas, penelitian ini akan berpegang pada asumsi bahwa integrasi gender dalam pembangunan daerah akan meningkatkan kualitas hasil pembangunan. Tinjauan pustaka ini juga menegaskan perlunya analisis kontekstual di Kabupaten Berau, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik sosial-budaya dan ekonomi yang unik yang memengaruhi dinamika gender.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Data dan informasi dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai dokumen resmi dan literatur terkait. Sumber data mencakup: (1) data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS); (2) dokumen perencanaan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau, seperti RPJMD Berau 2021–2026, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait PUG dan pemberdayaan perempuan; (3) publikasi dan laporan dari instansi terkait di tingkat provinsi dan nasional, termasuk Kementerian Dalam

Negeri serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan (4) artikel jurnal, buku, serta berita atau artikel analisis dari media lokal yang relevan dengan isu gender di Berau.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran *database online* dan situs web resmi pemerintah. Data kualitatif mengenai pelaksanaan program dan kebijakan diperoleh dari laporan pemerintah daerah serta berita terpercaya.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan komparatif. Data kuantitatif disajikan secara deskriptif dalam bentuk tabel atau uraian naratif untuk menunjukkan adanya kesenjangan atau perubahan indikator gender. Sementara data kualitatif dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait isu, tantangan, dan upaya kesetaraan gender di Berau. Penelitian ini juga melakukan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas temuan, misalnya dengan membandingkan data BPS dengan laporan pemerintah daerah, atau membandingkan informasi media dengan dokumen kebijakan resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu-Isu Gender di Kabupaten Berau

Berdasarkan data dan literatur yang dihimpun, Kabupaten Berau menghadapi

sejumlah isu gender yang khas sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, meskipun dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Salah satu isu mendasar adalah kesenjangan dalam partisipasi ekonomi. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di Berau masih lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini sejalan dengan kecenderungan nasional di mana TPAK perempuan sekitar 54% sementara laki-laki sekitar 82% (BPS, 2021). Di Berau, sektor-sektor unggulan daerah seperti pertambangan, energi, dan konstruksi didominasi tenaga kerja laki-laki, yang menyebabkan proporsi perempuan dalam tenaga kerja formal relatif kecil. Banyak perempuan Berau yang bekerja di sektor informal atau usaha rumah tangga (pertanian skala kecil, perdagangan mikro, kerajinan, dll.) yang seringkali tidak tercatat secara penuh dalam statistik ekonomi formal.

Pada sektor pendidikan, sebenarnya akses pendidikan di Berau tergolong relatif setara. Angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah dasar hingga menengah nyaris seimbang antara anak laki-laki dan anak perempuan. BPS Berau mencatat Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD dan SMP untuk siswa perempuan bahkan sedikit lebih tinggi atau setidaknya setara dengan siswa laki-laki pada beberapa tahun terakhir (Badan

Pusat Statistik Kabupaten Berau, 2021, hlm. 41). Hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi akses pendidikan dasar, tidak terdapat diskriminasi yang signifikan. Namun, tantangan dapat muncul pada tingkat pendidikan lanjut dan kejuruan. Walaupun data spesifik Berau belum ditemukan dalam penelitian ini, Kalimantan Timur secara umum menghadapi masalah perkawinan anak. Perkawinan anak mengakibatkan terhentinya pendidikan bagi anak perempuan dan berpotensi menimbulkan siklus kerentanan (Kemen PPPA, 2021).

Isu berikutnya adalah kesehatan dan kesejahteraan. Indikator kesehatan seperti angka harapan hidup perempuan di Berau biasanya sedikit lebih tinggi dibanding laki-laki, sesuai pola biologis umum. Namun, terdapat indikator khusus gender seperti angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang perlu dilihat dengan lensa gender. AKI secara langsung terkait dengan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, terutama selama kehamilan dan persalinan. Upaya Pemerintah Berau dalam program kesehatan ibu dan anak, seperti kampanye pemeriksaan kehamilan dan program posyandu, menjadi krusial untuk menekan isu-isu tersebut.

Pada ranah sosial dan budaya, tantangan terbesar barangkali adalah norma dan

pandangan masyarakat mengenai peran gender. Meskipun masyarakat Berau modern dan heterogen, nilai-nilai patriarkal masih dapat dijumpai, misalnya pandangan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan pencari nafkah utama, sedangkan perempuan mengurus rumah tangga. Pandangan ini sendiri tidak menjadi masalah jika tidak membatasi pilihan perempuan. Namun, seringkali stereotip semacam itu membuat peran perempuan di ranah publik dipandang sekunder.

Dengan mengidentifikasi isu-isu gender di atas – partisipasi ekonomi yang timpang, potensi ketidaksetaraan akses pendidikan lanjutan, kesehatan reproduksi ibu, norma budaya patriarkal, hingga kekerasan berbasis gender – kita dapat merumuskan intervensi yang lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah Berau perlu memiliki data terpilah gender yang akurat dan mutakhir untuk memetakan masalah. Laporan *Profil Gender* daerah akan sangat berguna dalam hal ini. Sebagai ilustrasi positif, Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan data kependudukan terpilah hingga tingkat kabupaten (id.wikipedia.org), yang memudahkan identifikasi wilayah dengan isu spesifik (misal kecamatan mana yang angka perkawinan anaknya tinggi, dsb.). Pendekatan berbasis

data inilah yang harus menjadi dasar penyusunan program ke depan.

Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Daerah

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain keterlibatan dalam ekonomi (sebagai tenaga kerja maupun pengusaha), partisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta kiprah dalam politik dan pemerintahan. Di Kabupaten Berau, keterlibatan perempuan menunjukkan tren peningkatan meskipun belum sepenuhnya setara.

Dalam sektor ekonomi, perempuan Berau berkontribusi baik sebagai pekerja maupun penggerak usaha mikro. Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Berau yang dikelola oleh perempuan, misalnya di bidang kerajinan tangan, kuliner lokal, maupun perdagangan hasil laut dan pertanian. Sektor pariwisata (seperti pengelolaan homestay di destinasi Kepulauan Derawan) juga melibatkan perempuan sebagai pelaku usaha. Perempuan-perempuan ini memainkan peran penting dalam menopang ekonomi keluarga dan komunitas. Namun demikian, tantangan yang dihadapi perempuan pelaku UMKM antara lain keterbatasan akses permodalan, kurangnya pelatihan manajemen bisnis, dan skala usaha yang masih kecil.

Pemerintah daerah melalui dinas terkait telah berupaya memberdayakan perempuan ekonomi produktif, misalnya dengan pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha milik perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam tenaga kerja formal di Berau juga mulai meningkat di sektor-sektor tertentu. Di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan publik misalnya, perempuan merupakan porsi signifikan dari tenaga profesional (guru, perawat/bidan, PNS administrasi). Bahkan, jabatan kepala OPD atau camat di Berau sudah ada yang dijabat perempuan, meskipun persentasenya belum dominan. Kehadiran perempuan di jabatan struktural menengah ini merupakan kemajuan yang patut dicatat. Secara politik, *affirmative action* melalui kebijakan kuota 30% calon legislatif perempuan telah berdampak pada meningkatnya jumlah perempuan di DPRD Berau. Hasil Pemilu Legislatif terakhir memperlihatkan beberapa perempuan berhasil memperoleh kursi DPRD. Meskipun proporsi perempuan di DPRD Berau masih di kisaran 15-20% (belum mencapai 30% ideal), hal ini lebih baik dibanding masa lalu ketika representasi perempuan nyaris nol. Seperti disebutkan sebelumnya, bahkan jabatan Ketua DPRD Berau periode 2014-2019 dipegang oleh Syarifatul Sya'diah yang merupakan

seorang perempuan (id.wikipedia.org). Keterwakilan perempuan di legislatif penting agar aspirasi dan kebutuhan kaum perempuan dapat tersuarakan dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pemerintahan daerah.

Pada proses perencanaan pembangunan, partisipasi perempuan di Berau didorong melalui mekanisme *Musyawarah Perencanaan Pembangunan* (Musrenbang) di tingkat kampung/kelurahan hingga kabupaten. Dinas teknis yang membawahi PUG (DPPKBP3A Berau) aktif mendorong keterlibatan komunitas perempuan dalam Musrenbang. Bahkan ditetapkan target minimal 30% peserta Musrenbang berasal dari unsur perempuan dan komunitas peduli perempuan/anak (nomorsatukaltim.disway.id). Hal ini sesuai instruksi Bupati Berau melalui surat edaran khusus pada Januari 2024 untuk pembentukan *Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak* (KRPPA) (nomorsatukaltim.disway.id). Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa daftar hadir Musrenbang harus mencantumkan jenis kelamin dan bukti keterlibatan perempuan (nomorsatukaltim.disway.id). Implementasi kebijakan ini mulai terlihat: pada Musrenbang RKPD tahun 2024, misalnya, sejumlah organisasi perempuan (seperti PKK, Gabungan Organisasi Wanita, dan kelompok konstituen

perempuan di kampung) diundang dan terlibat aktif menyampaikan usulan.

Contoh konkret inovasi di Berau adalah pembentukan Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) di beberapa kampung pilot. Program KRPPA ini mendorong perempuan untuk mengambil peran dalam struktur kelembagaan kampung, misalnya di Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) atau tim pelaksana kegiatan. Selain itu, program ini melibatkan *fasilitator daerah* (*Fasda*) yang membantu kampung menyusun matriks indikator capaian ramah perempuan dan anak (nomorsatukaltim.disway.id). Dampaknya, perempuan tidak lagi hanya menjadi obyek penerima program, tetapi turut mendesain dan mengawal program pembangunan di tingkat akar rumput. KRPPA juga mendorong terciptanya ruang publik yang nyaman bagi perempuan: misalnya posyandu yang aktif, taman ramah anak, penyediaan ruang laktasi di kantor desa, dan pos pengaduan kekerasan. Kesuksesan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif kaum perempuan setempat bersama aparat kampung.

Di tingkat pemerintahan daerah, keterlibatan perempuan terlihat dari posisi jabatan dan peran dalam birokrasi. Saat ini, pucuk pimpinan daerah Kabupaten Berau, yakni Bupati, dijabat oleh seorang perempuan

(Sri Juniarsih Mas) (id.wikipedia.org). Ini merupakan capaian penting karena seorang bupati memiliki kewenangan luas dalam menentukan arah kebijakan dan alokasi anggaran. Kepemimpinan perempuan di puncak eksekutif Berau membawa harapan akan keberpihakan yang lebih besar pada isu-isu pemberdayaan perempuan. Memang, sensitivitas gender tidak otomatis muncul hanya karena pemimpinnya perempuan, namun setidaknya pengalaman dan perspektif sebagai perempuan dapat memengaruhi prioritas kebijakan. Benar saja, di bawah kepemimpinan Bupati Sri Juniarsih, Berau menerbitkan Perda Pengarusutamaan Gender (tahun 2024) yang sebelumnya belum ada. Ini menunjukkan komitmen politik yang konkret. Selain itu, di struktur birokrasi, sudah ada beberapa kepala dinas perempuan (misal Kepala Dinas Kesehatan pada periode tertentu, Kepala DPPKBP3A, dan beberapa camat perempuan). Kehadiran perempuan di posisi tersebut dapat menjadi agen perubahan dari dalam birokrasi untuk memastikan program-program pembangunan mempertimbangkan kebutuhan perempuan.

Meskipun partisipasi perempuan di berbagai ranah sudah meningkat, tantangan untuk mencapai representasi seimbang masih ada. Dalam politik, misalnya, kendala seperti kultur *male-dominated* dalam partai, beban

ganda perempuan, dan keterbatasan sumber daya kerap menghambat perempuan maju sebagai calon pemimpin. Namun, dukungan kebijakan seperti pelatihan kepemimpinan perempuan, *networking* antar perempuan politisi, dan penegakan kuota calon legislatif mampu perlahan-lahan membuka jalan lebih lebar. S

Kebijakan Daerah Terkait Kesetaraan Gender

Pemerintah Kabupaten Berau telah mengeluarkan sejumlah kebijakan daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kebijakan-kebijakan ini sejalan dengan kerangka hukum nasional, serta menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Berikut adalah beberapa kebijakan kunci di Berau terkait isu gender:

- a) Integrasi PUG dalam Dokumen Perencanaan – Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau 2021–2026, prinsip pengarusutamaan gender telah diintegrasikan sebagai salah satu strategi pembangunan.
- b) Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG – Perbup ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional untuk mengarusutamakan gender di daerah. Isi

Perbup 32/2019 mencakup pembentukan *Pokja PUG* di Kabupaten Berau, penunjukan focal point PUG di tiap OPD, dan kewajiban menyusun *Gender Analysis Pathway* (GAP) serta *Gender Budget Statement* (GBS) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran OPD. Dengan kata lain, sejak 2019 Berau telah berusaha menerapkan *gender-responsive planning and budgeting*.

- c) Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah – Ini merupakan landasan hukum terbaru yang sangat penting. Perda ini menjadikan PUG sebagai mandat legal yang mengikat seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Berau (peraturan.bpk.go.id).
- d) Program dan Kebijakan Sektoral Responsif Gender – Selain kebijakan umum di atas, terdapat pula kebijakan sektoral yang mendukung kesetaraan gender:

- Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Berau memiliki kebijakan *Wajib Belajar 12 Tahun* tanpa diskriminasi gender. Program beasiswa daerah juga diberikan proporsional antara siswa laki-laki dan perempuan.

- Di sektor kesehatan, program *Safe Motherhood* dan *Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak* digalakkan melalui puskesmas. Dinas Kesehatan juga bekerja sama dengan organisasi seperti PKK untuk sosialisasi kesehatan reproduksi remaja putri, pencegahan stunting, dsb.
- Di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, ada *pelatihan keterampilan* bagi pencari kerja perempuan, program penempatan tenaga kerja yang mendorong penyerapan perempuan di sektor formal, serta pengembangan koperasi wanita.
- Pada aspek perlindungan, Kabupaten Berau telah membentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di bawah DPPKBP3A. P2TP2A berfungsi menangani kasus KDRT, kekerasan seksual, perdagangan orang, dan masalah lainnya yang menimpa perempuan dan anak.
- Mendorong lahirnya Peraturan Kampung yang sensitif gender. Misalnya, ada kampung di Berau yang membuat peraturan melarang

perkawinan di bawah usia 18 tahun sebagai upaya mencegah perkawinan anak. Juga pembentukan posko pengaduan di kampung untuk memantau tindak kekerasan.

- e) Program *Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA)* – Meskipun bukan payung hukum formal, program ini sangat strategis sehingga patut dianggap kebijakan. Dicanangkan melalui Surat Edaran Bupati awal 2024, program KRPPA merupakan inovasi yang *inline* dengan arahan Kementerian PPPA. Kepala kampung didorong menerbitkan peraturan di tingkat lokal untuk mendukung hal ini. Misalnya, kewajiban bagi setiap acara di kampung untuk menyediakan tempat penitipan anak atau sudut bermain anak, sehingga ibu-ibu dapat ikut rapat dengan tenang. Walaupun program KRPPA masih dalam tahap awal, komitmen formal melalui surat edaran dan dukungan anggaran (dana pemberdayaan) telah diberikan. Ini menunjukkan pendekatan *top-down* dari pemerintah daerah yang berpadu dengan inisiatif *bottom-up* di komunitas.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten

Berau tidak hanya memenuhi kewajiban administratif semata, tetapi berupaya inovatif dalam mendorong kesetaraan gender. Kebijakan tingkat makro (RPJMD, Perda) memberikan payung dan arah jelas, sementara kebijakan mikro (program spesifik) menysasar langsung kebutuhan perempuan di komunitas. Salah satu faktor pendorong lahirnya kebijakan-kebijakan ini adalah advokasi dari aktor-aktor kunci. Di Berau, keberadaan figur Bupati perempuan menjadi katalis, ditambah dukungan DPRD dan birokrat yang sadar gender, serta kelompok masyarakat sipil seperti PKK dan forum anak.

Tantangan Pembangunan Responsif Gender

- a. Budaya Patriarki dan Stereotip Gender
Meskipun generasi muda cenderung lebih terbuka, pengaruh budaya yang mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan publik dapat menghambat perempuan untuk berkiprah. Misalnya, perempuan yang berkarir kerap menghadapi beban ganda – dituntut sukses di pekerjaan tapi juga mengurus rumah tangga.
- b. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Meskipun sudah ada kelembagaan PUG (Pokja PUG, *focal point* di OPD), tantangan berikutnya adalah memastikan lembaga-lembaga ini benar-benar

berfungsi. Keterbatasan kapasitas SDM menjadi isu. Tidak semua pegawai pemerintah atau perencana daerah memahami analisis gender. Sering kali PUG dianggap tambahan pekerjaan birokrasi sehingga pelaksanaannya formalitas belaka.

c. Data Terpilah dan Indikator Kinerja

Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin masih menjadi tantangan teknis. Walau Dukcapil dan BPS sudah menyajikan data populasi laki-laki/perempuan, banyak indikator pembangunan lain belum terpilah. Misalnya data kemiskinan mungkin belum terpisah antara rumah tangga kepala perempuan vs kepala laki-laki, data UMKM belum jelas berapa milik perempuan, data pengangguran terpilah pun kadang tidak muncul di publikasi rutin. Tanpa data yang detail, sulit mengukur masalah dan kemajuan. Indikator kinerja program juga perlu disusun sedemikian rupa agar sensitif gender.

d. Partisipasi dan Kesadaran Publik

Tantangan lain adalah meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya kesetaraan gender. Selama ini, mungkin isu gender dianggap sebagai urusan pemerintah atau hanya

diperjuangkan aktivis perempuan. Padahal keterlibatan masyarakat luas akan menentukan keberhasilan pembangunan responsif gender. Misalnya, program mendorong anak perempuan melanjutkan sekolah perlu dukungan orang tua di rumah.

e. Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor

PUG pada hakekatnya lintas sektor, sehingga diperlukan koordinasi antar OPD yang solid. Tantangan koordinasi klasik di birokrasi adalah ego sektoral, di mana setiap dinas fokus pada urusannya sendiri. Menerapkan PUG berarti mendorong dinas-dinas yang sebelumnya tidak terkait isu gender (seperti Dinas PU, Dinas Perhubungan) untuk turut berperan, misalnya dengan memastikan proyek infrastruktur mempertimbangkan kebutuhan perempuan (penerangan jalan, akses jalan ke fasilitas kesehatan, dll.).

f. Resistensi atau Mispersepsi

Upaya kesetaraan gender kadang mendapat resistensi dari pihak-pihak yang kurang memahami maksudnya. Mispersepsi seperti *gender equality* dianggap “membalik hierarki” (perempuan menguasai laki-laki) atau kekhawatiran berlebihan seperti diungkapkan Bupati sebelumnya bahwa

karier perempuan bisa merusak harmoni keluarga (kompasiana.com).

g. Evaluasi dan Keberlanjutan Program

Kadang suatu program dijalankan dengan semangat di awal, namun seiring waktu menurun intensitasnya. Tantangan keberlanjutan ini berlaku pula pada program-program responsif gender. Misalnya, jika Kampung Ramah Perempuan tidak didampingi terus menerus, bisa saja setelah deklarasi awal lalu stagnan.

Peluang dalam Mewujudkan Pembangunan Responsif Gender

Di balik tantangan yang ada, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan Kabupaten Berau untuk mempercepat terwujudnya pembangunan yang responsif gender.

a. Komitmen dan Dukungan Politik yang Kuat

Kepemimpinan daerah saat ini sangat membuka peluang keberhasilan PUG. Bupati Sri Juniarsih sebagai pemimpin perempuan cenderung memiliki *political will* tinggi terhadap isu gender, terbukti dengan lahirnya Perda PUG 2024. Dukungan DPRD yang mengesahkan perda tersebut juga sinyal positif bahwa legislatif mendukung kesetaraan gender.

Peluang ini harus dimanfaatkan dengan mendorong implementasi nyata saat momentum politik mendukung.

b. Kerangka Kebijakan dan Hukum yang Lengkap

Dengan adanya Inpres 9/2000, Permendagri soal PUG, hingga Perda PUG di Berau, maka landasan hukum sudah memadai. Ini peluang karena aparat memiliki acuan jelas. Tinggal meningkatkan *law enforcement* atau penerapan kebijakannya.

c. Bonus Demografi dan Kualitas SDM Perempuan

Berau memiliki populasi muda yang cukup besar. Bonus demografi ini berarti banyak angkatan kerja usia produktif, termasuk perempuan muda terdidik yang jumlahnya terus meningkat. Semakin banyak perempuan Berau yang berpendidikan tinggi (D3/S1). Ini potensi SDM yang luar biasa untuk menggerakkan

d. Kemajuan Teknologi dan Media Sosial

Era digital memberikan peluang untuk edukasi dan kampanye kesetaraan gender secara lebih luas dan efektif. Di Berau, penggunaan *smartphone* dan media sosial cukup tinggi. Pemerintah dan pegiat gender dapat memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, hingga

WhatsApp group komunitas untuk menyebarkan pesan-pesan kesetaraan gender, informasi layanan P2TP2A, atau profil perempuan inspiratif lokal. Media sosial juga dapat digunakan untuk pelatihan daring bagi aparaturnya tentang analisis gender, sehingga kendala jarak dapat diatasi.

e. Jaringan Kerja dan Kemitraan

Peluang lainnya adalah banyaknya mitra pembangunan yang fokus pada isu gender. Sebut saja UN Women, UNDP, atau NGO internasional sering memiliki program gender di Indonesia. Kalimantan Timur dengan posisi strategis (apalagi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara di provinsi tetangga) menarik perhatian program-program tersebut.

f. Kesadaran Publik yang Mulai Tumbuh

Generasi muda dan kalangan terdidik di Berau kini lebih familiar dengan konsep kesetaraan gender dibanding satu atau dua dekade lalu. Pendidikan formal dan akses informasi global berperan meningkatkan kesadaran ini. Peluangnya, inisiatif-inisiatif dari masyarakat mulai muncul. Misalnya, komunitas lokal untuk dukungan ibu bekerja, kelompok diskusi perempuan muda, atau aktivis yang mempromosikan anti-kekerasan.

Pemerintah dapat merangkul komunitas ini agar menjadi *agent of change*.

g. Evaluasi Positif dan Pembelajaran

Ketika kebijakan mulai berjalan, seringkali ada *quick wins* atau keberhasilan awal yang dapat diangkat sebagai kisah sukses. Misalnya, jika salah satu kampung ramah perempuan berhasil menurunkan angka putus sekolah anak perempuan secara signifikan, hal ini bisa dijadikan contoh untuk diterapkan di kampung lain. Begitu pula, keberhasilan perempuan Berau dalam memimpin (Bupati) bisa menjadi cerita motivasi tingkat nasional (branding Berau sebagai kabupaten pro-kesetaraan).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gender dan pembangunan di Kabupaten Berau memiliki hubungan yang saling mempengaruhi secara erat. Pembangunan daerah yang berhasil tidak dapat dilepaskan dari peran aktif dan kontribusi setara dari perempuan maupun laki-laki. Kabupaten Berau, dengan segala potensi dan tantangannya, telah mengambil langkah-langkah progresif menuju pembangunan yang lebih inklusif gender.

Kabupaten Berau berada pada jalur yang benar menuju pembangunan daerah yang lebih berkeadilan gender. Kebijakan dan inisiatif

yang telah dijalankan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah mengintegrasikan perspektif gender. Namun, upaya ini perlu diperkuat dan dipercepat. Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain: (1) meningkatkan kapasitas SDM pemerintah dan masyarakat tentang analisis gender melalui pelatihan rutin; (2) memastikan setiap OPD memiliki rencana aksi PUG dan melaporkan capaian tahunannya; (3) memperkuat pengumpulan data terpilah gender dan pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan; (4) melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam kampanye kesetaraan gender untuk menembus hambatan budaya; (5) memberikan penghargaan atau insentif bagi kecamatan/kampung yang berhasil menerapkan inisiatif ramah perempuan sebagai motivasi bagi wilayah lain; dan (6) mendorong partisipasi laki-laki dalam promosi kesetaraan (misalnya melalui deklarasi *HeForShe* lokal), sehingga kesetaraan gender dilihat sebagai agenda bersama, bukan hanya agenda perempuan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau. (2021). *Kabupaten Berau Dalam Angka 2021*. Berau: BPS. (Data demografi, sosial-ekonomi, dan indikator terpilah gender Kabupaten Berau)id.wikipedia.org id.wikipedia.org.
- Bappenas (Kementerian PPN). (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. (Dokumen perencanaan nasional yang mengarusutamakan perspektif gender dalam pembangunan berbagai sektor).
- Indriani, Ira. (2024). Pengaruh Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Objek Wisata, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau. *Eco-Build; Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*. 36-49
- Indriani, Ira. (2022). Pengaruh Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Berau: Pengaruh Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Berau. *Eco-Build; Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*. 9-18
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2024). *Visualisasi Data Kependudukan Semester II 2024 – Kabupaten Berau*. Jakarta: Ditjen Dukcapil Kemendagri. (Data jumlah penduduk Berau tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin) id.wikipedia.org.
- Koran Kaltim. (2021, 26 Februari). *Sri Juniarsih, Bupati Perempuan Pertama Kabupaten Berau*. KoranKaltim.com. Diakses dari arsip web id.wikipedia.org. (Berita penetapan Sri Juniarsih Mas sebagai bupati perempuan pertama di Berau).
- Munalaya. (2020, 31 Maret). *Bupati Berau Himbau Kesetaraan Gender Jangan Sampai Disalahartikan*. Kompasiana. Diakses dari [https://www.kompasiana.com/munalaya90/..​:contentReference\[oaicite:35\]{index=35}](https://www.kompasiana.com/munalaya90/..​:contentReference[oaicite:35]{index=35}). (Artikel opini yang memuat pandangan Bupati Berau tentang pentingnya pemahaman yang tepat mengenai kesetaraan gender).
- Pemerintah Kabupaten Berau. (2019). *Peraturan Bupati Berau Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender*. Tanjung Redeb: Pemkab Berau. (Regulasi bupati yang menjadi panduan teknis pelaksanaan strategi PUG di Kabupaten Berau).
- Pemerintah Kabupaten Berau. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah*. Tanjung

Redeb: Pemkab Berau. (Perda yang mengatur kerangka hukum dan kelembagaan untuk penerapan kesetaraan gender dalam pembangunan di Berau) peraturan.bpk.go.id.

Presiden RI. (2000). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta. (Landasan kebijakan nasional yang mengamanatkan integrasi perspektif gender di seluruh sektor dan tingkat pemerintahan) peraturan.bpk.go.id.

Rizal. (2024, 5 Februari). *Upaya Atasi Masalah Kesetaraan Gender; DPPKBP3A Berau Buat Program Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak*. Nomorsatu Kaltim. Diakses dari [https://nomorsatukaltim.disway.id/...​;contentReference\[oaicite:37\]{index=37}​;contentReference\[oaicite:38\]{index=38}](https://nomorsatukaltim.disway.id/...​;contentReference[oaicite:37]{index=37}​;contentReference[oaicite:38]{index=38}). (Laporan berita mengenai inisiatif DPPKBP3A Berau meluncurkan program KRPPA untuk mendorong kesetaraan gender di tingkat kampung).

World Economic Forum. (2022). *Global Gender Gap Report 2022*. Cologny/Geneva: World Economic Forum. (Laporan tahunan yang memuat indeks kesenjangan gender global, posisi dan skor Indonesia dalam pencapaian kesetaraan